



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA DUMAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SAYUTI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 64311

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 960.000.000

1. Tanah Seluas 720 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
2. Tanah Seluas 10.000 m2 di NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. Tanah Seluas 10.000 m2 di NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. Bangunan Seluas 54 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/168 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 122.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.



8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 36.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 289.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.407.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.407.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.